

# PERSEPSI, KEBUTUHAN DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN "MERDEKA BELAJAR, KAMPUS MERDEKA" PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI WILAYAH PERBATASAN

Bella Ghia Dimmera <sup>1</sup>, Pebria Dheni Purnasari <sup>2</sup>, dan Yosua Damas Sadewo <sup>3</sup>

<sup>1</sup>Manajemen, Institut Shanti Bhuana

<sup>2,3</sup>Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Institut Shanti Bhuana

<sup>1,2,3</sup>Jln. Bukit Karmel No.1, Bengkayang, Kalimantan Barat, 79211

E-mail: bellaghia@shantibhuana.ac.id <sup>1</sup>, pebria.dheni@shantibhuana.ac.id <sup>2</sup>, yosua.damas@shantibhuana.ac.id <sup>3</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui persepsi, kebutuhan dan tantangan implementasi "Merdeka Belajar, Kampus Merdeka" terkhusus bagi perguruan tinggi swasta di wilayah Perbatasan atau 3T (terdepan, terluar, tertinggal) mengingat kondisi perbatasan atau 3T di Indonesia didominasi dengan ketimpangan infrastruktur pendidikan yang kurang memadai. Wilayah perbatasan yang dimaksud salah satunya adalah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif, sedangkan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian diperoleh melalui observasi, studi pustaka kuesioner dan wawancara yang dilakukan kepada para responden, meliputi pimpinan perguruan tinggi, unit pengembangan kurikulum perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa. Adapun responden yang diambil adalah pemangku kepentingan internal kampus di dua perguruan tinggi swasta yang ada di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, yakni Institut Shanti Bhuana dan Akademi Manajemen Bumi Sebalu. Teknik pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* dari masing-masing perguruan tinggi swasta yang berada di Kabupaten Bengkayang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kebijakan, program, kegiatan, telah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan, meskipun masih ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini kesulitan yang dihadapi oleh perguruan tinggi di wilayah perbatasan adalah infrastruktur yang belum memadai. Setiap program maupun bentuk kegiatan pembelajaran harapannya mampu menjawab permasalahan pendidikan khususnya di wilayah perbatasan, sehingga mahasiswa di daerah juga mampu bersaing dalam dunia kerja.

**Kata kunci:** Kebutuhan; Tantangan; Kebijakan MBKM; Wilayah Perbatasan

## 1. PENDAHULUAN

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan program yang dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi perubahan zaman dan kemajuan teknologi yang berkembang dengan cepat. Keterampilan mahasiswa harus dipersiapkan agar lebih responsif sesuai dengan kebutuhan zaman sehingga melalui MBKM diharapkan mahasiswa dapat bersaing di dunia pendidikan. Kebijakan MBKM hakikatnya merupakan suatu upaya pemerintah untuk mewujudkan pembelajaran di perguruan tinggi bersifat otonom dan fleksibel guna menciptakan budaya pembelajaran yang inovatif, bebas, dan disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa.

Program utama MBKM yang diselenggarakan, meliputi: Otonomi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan akreditasi A dan B untuk membuka atau mendirikan PRODI baru; Terakreditasi bersifat otomatis dan sukarela untuk semua perguruan tinggi maupun PRODI yang siap meningkatkan peringkat akreditasi; Kebebasan bagi PTN untuk menjadi PTN Badan Hukum; dan Mahasiswa

diberikan hak untuk mengambil mata kuliah di luar PRODI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan (Kemendikbud, 2020).

Kebijakan MBKM yang muncul sebagai hal baru tentunya banyak mengalami tantangan dan hambatan dalam implementasinya baik di perguruan tinggi negeri ataupun swasta, sehingga peran para pegiat pendidikan perlu dilakukan untuk mengkritisi dan menganalisis bagaimana kebijakan tersebut diterima dan diimplementasikan oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dalam perkembangannya, telah banyak studi atau riset yang telah dilakukan mengenai implementasi MBKM di perguruan tinggi. Riset mengenai implementasi MBKM antara lain berupa tantangan implementasi MBKM (Arifin & Muslim, 2020), studi kasus pelaksanaan MBKM (Sulistiyan E. K., 2021), dampak implementasi MBKM (Meke K. D., 2022), serta persepsi mahasiswa terhadap implementasi MBKM (Meke K. D., 2022) yang telah dilakukan. Namun, belum terdapat riset yang membahas mengenai persepsi, kebutuhan dan tantangan implementasi MBKM

terkhusus bagi perguruan tinggi swasta di wilayah perbatasan atau 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Berangkat dari hal tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan riset mengenai persepsi, kebutuhan dan tantangan implementasi MBKM terkhusus bagi perguruan tinggi swasta di wilayah Perbatasan atau 3T, mengingat kondisi perbatasan atau 3T di Indonesia didominasi dengan ketimpangan infrastruktur pendidikan yang kurang memadai. Wilayah perbatasan yang dimaksud salah satunya adalah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia (Purnasari P. D., 2021). Terdapat satu Perguruan Tinggi Swasta Strata 1 (S1) dan dua Perguruan Tinggi Swasta Akademi D3 di Kabupaten Bengkayang, dimana melalui hasil observasi yang dilakukan bahwa ketiga PTS tersebut sedang pada masa mencoba mengimplementasikan MBKM. Sehingga riset mengenai implementasi MBKM di perguruan tinggi tersebut perlu dilakukan guna sebagai sumbangan temuan bagaimana implementasi MBKM di wilayah perbatasan serta sebagai referensi mengenai persepsi, kebutuhan dan tantangan apa yang dihadapi oleh PTS di wilayah perbatasan dalam mengimplementasikan MBKM. Lebih lanjut temuan riset dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk penerapan MBKM yang lebih baik, terkhusus bagi PTS yang berada di wilayah perbatasan.

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: bagaimanakah persepsi mengenai implementasi penerapan MBKM untuk perguruan tinggi swasta di wilayah perbatasan?; bagaimanakah kebutuhan mengenai implementasi penerapan MBKM untuk perguruan tinggi swasta di wilayah perbatasan?; dan bagaimanakah tantangan implementasi penerapan MBKM untuk perguruan tinggi swasta di wilayah perbatasan?

Penelitian yang berkaitan dengan persepsi, kebutuhan, dan tantangan implementasi penerapan MBKM untuk perguruan tinggi swasta di wilayah perbatasan ini memilih lokasi penelitian di Institut Shanti Bhuana dan Akademi Manajemen Bumi Sebalu. Dua perguruan tinggi tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan sekolah yang berada di wilayah perbatasan yakni di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat.

## 2. RUANG LINGKUP

Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” diterima antusias oleh masyarakat Indonesia, serta tentunya berbagai pro dan kontra pun terjadi. Hingga awal 2022 telah muncul beberapa riset yang mengkaji mengenai implementasi kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” pada perguruan tinggi. Hasil riset mengenai konsep dan implementasi yang dilakukan oleh (Sopiansyah, 2022) mengemukakan bahwa perguruan tinggi diharapkan berkomitmen menyediakan dan memfasilitasi Program MBKM sebagaimana yang diamanatkan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020

maupun yang dijelaskan dalam Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Dengan demikian ada Sembilan Program MBKM yaitu, Pertukaran Mahasiswa, Praktik Kerja Profesi, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, Proyek/Membangun Desa, dan Pelatihan Bela Negara. Kemudian disampaikan bahwa implementasi dari kurikulum MBKM perlu dilaksanakan perumusan kurikulum yang maksimal karena melibatkan mitra untuk mencapai hasil pembelajaran di perguruan tinggi. Dalam pelaksanaannya perguruan tinggi melibatkan pihak eksternal dalam merumuskan kurikulum sehingga hasil lulusannya bisa diterima di dunia kerja. Ada beberapa program yang disepakati yaitu adanya: pertukaran pelajar, magang, praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/KKN.

Lebih lanjut hasil riset yang dilakukan oleh (Meke K. D., 2022) mengenai Persepsi Mahasiswa Terhadap Desain Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mengemukakan bahwa hasil dari penelitian survei yang telah dilakukan menunjukkan bahwa mahasiswa pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores memberikan respon yang positif terhadap program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Temuan lainnya juga disampaikan bahwa Mayoritas mahasiswa hanya mengetahui sebagian kecil kebijakan MBKM dan kurang memahami hak belajar (jumlah semester dan SKS maksimal) di luar Perguruan Tinggi. Mahasiswa Ilmu Hukum juga berpendapat bahwa media informasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman kebijakan MBKM adalah sosialisasi luring/daring baik yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi maupun oleh Kemendikbud.

Implementasi kebijakan MBKM juga menemukan kendala pada tahap pelaksanaannya, hal tersebut diungkapkan melalui temuan riset (Agus, 2022), bahwa terdapat kendala yang dialami Program Studi dan dosen dalam pelaksanaan Kebijakan MBKM, yakni perlunya menyesuaikan ulang kurikulum, kurangnya SDM, kurangnya mitra magang dan kewirausahaan, masih kurangnya PRODI lain yang menjalankan MBKM yang bersesuaian dengan latar belakang PRODI asal, serta padatnya jadwal mengajar dosen. Kemudian terdapat kendala yang dialami mahasiswa, yakni jaringan yang kurang stabil, proses pembelajaran yang kurang interaktif, sosialisasi yang masih perlu di masif terkhusus dari program studi, lambatnya penginputan nilai, kurangnya kegiatan di masa COVID untuk program magang, pengecekan bahan untuk produk wirausaha secara langsung tidak dapat dilakukan, sulitnya membangun komunikasi dengan pihak sekolah pada program Kampus Mengajar Angkatan 1.

Disisi lain program kebijakan MBKM mendapat apresiasi penuh dari Perguruan Tinggi karena program

MBKM memberikan dampak positif terhadap perguruan tinggi. Hal tersebut selaras dengan hasil riset (Riyadi, 2022), bahwa perspektif rata-rata 41.03% setuju dan 45.21% sangat setuju kebijakan MBKM berdampak baik pada pencapaian UMY menuju *Research Excellence University* secara umum. Selain itu program UMY yang secara substansial sesuai dengan MBKM telah dilaksanakan sejak tahun 2017 dan memberikan dampak pencapaian indikator UMY *Research Excellence University*.

Melalui beberapa temuan dan riset yang telah dilakukan, terdapat riset yang belum pernah dilaksanakan atau dilakukan terkhusus mengenai implementasi Kebijakan MBKM di Perguruan Tinggi Swasta terkhusus yang berada di wilayah perbatasan atau 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Wilayah perbatasan dalam pandangan secara umum tidak terhindar dari label tertinggal dengan kondisi infrastruktur pendidikan yang masih kurang. Dalam konteks penelitian ini, wilayah perbatasan yang dimaksud adalah Kabupaten Bengkayang Kalimantan barat. Secara geografis, Kabupaten Bengkayang berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga wilayah tersebut dikategorikan sebagai wilayah perbatasan (terdepan dan terluar), terlebih lagi wilayah Bengkayang sampai tahun 2019 dikategorikan sebagai daerah tertinggal sehingga kondisi tersebut menjadikan wilayah ini menyandang status 3T, yakni terdepan, terluar dan tertinggal (Purnasari P. D., 2021). Kondisi wilayah Bengkayang secara garis besar tidak semaju daerah perkotaan atau kota-kota besar di Indonesia, infrastruktur yang minim serta sarana dan prasarana di beberapa sekolah masih tergolong kurang (Sadewo, 2019). Terdapat satu perguruan tinggi swasta strata 1 dan dua perguruan tinggi swasta akademi D3 di Kabupaten Bengkayang, dimana melalui hasil observasi yang dilakukan bahwa ketiga perguruan tinggi swasta tersebut sedang pada masa mencoba melaksanakan MBKM. Melalui kondisi keterbatasan di wilayah perbatasan dan infrastruktur pendidikan yang kurang, ke tiga perguruan tinggi swasta tersebut dihadapkan pada kebijakan MBKM. Tentunya menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi perguruan tinggi swasta yang berada di wilayah perbatasan dengan berbagai kondisi dan kekurangannya dalam melaksanakan kebijakan MBKM. Sehingga riset mengenai persepsi, kebutuhan dan tantangan implementasi penerapan MBKM untuk perguruan tinggi swasta di wilayah perbatasan perlu dilakukan. Temuan dari riset tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk penerapan MBKM yang lebih baik, terkhusus bagi PTS yang berada di wilayah perbatasan. Serta sebagai bahan untuk menentukan strategi penerapan MBKM yang lebih baik terkhusus bagi PTS yang berada di wilayah perbatasan.

### 3. BAHAN DAN METODE

Penelitian dengan fokus “Persepsi, Kebutuhan dan Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” pada Perguruan Tinggi Swasta di

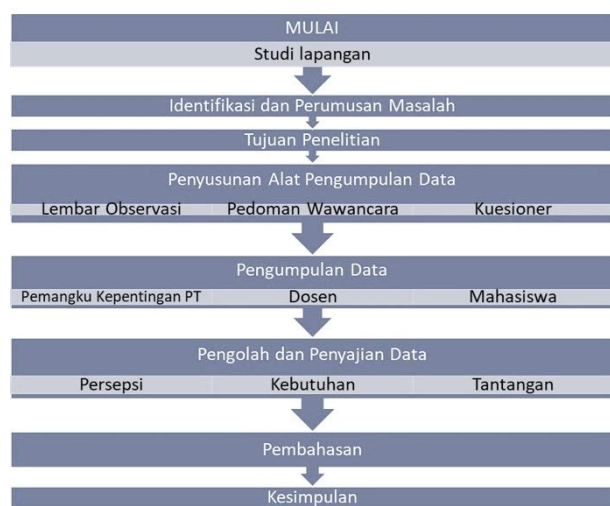
Wilayah Perbatasan” dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Adapun desain penelitian menggunakan analitik dengan metode survei. Sumber data dalam penelitian diperoleh melalui observasi, studi pustaka kuesioner dan wawancara yang dilakukan kepada para responden. Adapun responden yang diambil adalah pemangku kepentingan kampus, dosen dan mahasiswa di 2 perguruan tinggi swasta yang ada di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, yakni Institut Shanti Bhuana dan Akademi Manajemen Bumi Sebalu. Teknik pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* dari masing-masing perguruan tinggi swasta yang berada di Kabupaten Bengkayang. Kajian utama dalam penelitian yang dilakukan adalah untuk mencari Persepsi, Kebutuhan dan Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” pada Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah Perbatasan. Sehingga sumber primer dalam penelitian ini adalah kebijakan kurikulum “Merdeka Belajar” yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, hasil observasi, hasil kuesioner dan hasil wawancara yang dilakukan. Sedangkan sumber sekunder didapat dari artikel jurnal nasional maupun internasional, undang-undang negara, buku, dan sumber lainnya yang dapat menunjang keberhasilan dalam penelitian.

Penelitian dilakukan melalui tiga tahapan, pada tahap pertama yakni penyiapan perangkat pengumpulan data. Adapun indikator implementasi MBKM meliputi; pemahaman dan persepsi mengenai MBKM, ketersediaan perguruan tinggi dalam pelaksanaan program MBKM, kemampuan perguruan tinggi dalam implementasi program MBKM, kebutuhan perguruan tinggi dalam pelaksanaan MBKM, hambatan atau kendala dan tantangan perguruan tinggi dalam implementasi MBKM. Indikator tersebut kemudian ditujukan kepada tiga kategori responden, yakni kepada pemangku kepentingan perguruan tinggi/ kampus, kemudian kepada dosen, dan kepada mahasiswa. Indikator implementasi MBKM yang telah ditentukan kemudian diturunkan menjadi pedoman wawancara yang digunakan untuk mencari data melalui wawancara kepada pemangku kepentingan perguruan tinggi dan dosen. Indikator implementasi MBKM juga diturunkan menjadi pertanyaan dan pernyataan dalam bentuk kuesioner yang diberikan kepada responden kategori mahasiswa pada dua perguruan tinggi swasta yang berada di Kabupaten Bengkayang.

Tahap kedua dalam penelitian yang dilakukan adalah pengambilan dan pengumpulan data. Kegiatan observasi dilakukan dengan meninjau kedua perguruan tinggi swasta dengan melihat secara langsung kondisi ataupun keadaan yang terjadi. Tinjauan Pustaka dilakukan untuk mencari data ataupun dukungan sumber yang relevan dengan penelitian. Wawancara juga dilakukan baik secara daring maupun secara luring dengan izin dan protokol kesehatan yang benar serta dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah tersusun.

Kuesioner untuk mahasiswa yang telah tersusun juga disebar melalui metode daring dengan memanfaatkan media *google form*, serta dengan metode luring yakni menyiapkan kuesioner dalam bentuk *hardfile* dengan dukungan dan izin dari masing-masing perguruan tinggi. Hal tersebut dilakukan mengingat terdapat beberapa mahasiswa yang tidak memiliki perangkat pendukung untuk mengisi kuesioner secara daring dan beberapa mahasiswa juga masih terkendala dalam akses jaringan dan listrik.

Tahap yang ketiga atau yang terakhir adalah tahap penyusunan dan rekap data. Data berupa hasil observasi, studi pustaka, hasil wawancara, hasil kuesioner selanjutnya dilakukan pengolahan dan penyusunan. Secara keseluruhan penelitian yang dilakukan digambarkan melalui diagram alir penelitian berikut.



**Gambar 1. Diagram Alir Penelitian**

#### 4. PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di wilayah perbatasan dalam lingkup perguruan tinggi swasta di Kabupaten Bengkayang, sehingga responden pada penelitian ini dipilih berdasarkan kebutuhan peneliti sesuai dengan sumber data yang relevan dengan pelaksanaan penelitian mengenai MBKM.

Berdasarkan hasil penelitian yang dihasilkan di lapangan, bahwa kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) sudah diimplementasikan pada dua perguruan tinggi di wilayah perbatasan. Namun, secara umum dua perguruan tinggi ini belum memiliki kesiapan yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan MBKM, seperti kesiapan dalam penetapan kebijakan, pelaksanaan sesuai standar yang ditetapkan, pemahaman pihak-pihak yang terlibat, target yang ingin dicapai, dukungan lingkungan, sumber daya yang memadai. Selain itu, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi adalah mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi, sehingga peringkat akreditasi perguruan tinggi juga memiliki peran penting dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan MBKM. Dari dua perguruan

tinggi di wilayah perbatasan yang difokuskan pada penelitian ini adalah Institut Shanti Bhuana dan Akademi Manajemen Bumi Sebalu sudah memiliki program studi yang terakreditasi.

Institut Shanti Bhuana merupakan Perguruan Tinggi Swasta Strata 1 (S1) yang terdiri dari empat program studi: Program Studi Manajemen (Akreditasi C), Program Studi Kewirausahaan (Akreditasi C), Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi Minimal), dan Program Studi Teknologi Informasi (Terakreditasi Minimal). Sedangkan, Akademi Manajemen Bumi Sebalu merupakan Perguruan Tinggi Swasta Akademi D3 yang memiliki satu program studi yaitu Program Studi Manajemen Perusahaan dengan peringkat akreditasi C. Berdasarkan hasil di lapangan bahwa dua perguruan tinggi menunjukkan sudah mendukung kebijakan MBKM, namun program yang dapat dilaksanakan baru satu program yaitu bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi.

Beberapa program yang telah dilakukan oleh Institut Shanti Bhuana dan Akademi Manajemen Bumi Sebalu dalam pelaksanaan MBKM, antara lain: merumuskan dan menetapkan kurikulum sesuai dengan model implementasi MBKM, melaksanakan sosialisasi mengenai MBKM kepada *civitas academica*, memfasilitasi serta memberikan arahan kepada mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran di luar program studi.

Salah satu program yang belum dilaksanakan yaitu menjalin kerja sama dengan mitra yang relevan masih kurang, baik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, lembaga pemerintah, maupun masyarakat guna menunjang kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar program studi. Termasuk dalam hal ini sulitnya memenuhi standar yang ditetapkan Kemendikbud sesuai Panduan MBKM terkait kerjasama, dikarenakan beberapa mitra telah memiliki standar kerja sama yang ketat sehingga menerapkan adanya sistem seleksi untuk melakukan kerja sama

Terdapat beberapa alasan yang mendasari mengapa proses MBKM ini ada, salah satunya adalah karena adanya permintaan kebutuhan dari Dunia Usaha dan Dunia Industri. Hal ini bertujuan sebagai upaya untuk mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi agar lebih otonom dan fleksibel. Selain itu juga untuk menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kebijakan yang mendasarinya adalah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan menyoroti program MBKM, mencakup: perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil/tidak); dapat mengambil SKS di luar PT sebanyak 2 semester (setara dengan 40 SKS) ditambah lagi, dapat mengambil SKS di PRODI yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 SKS) (Kemendikbud, 2020). Namun, masih ada kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan MBKM yakni mengonversi mata kuliah dan

persyaratan lain yang harus dipenuhi perguruan tinggi untuk menyelesaikan kegiatan MBKM tersebut.

Program MBKM ini tentunya memiliki pro dan kontra dalam setiap proses penerapannya. Pendukung keberhasilan MBKM: pergerakan perguruan tinggi dalam proses belajar mengajar lebih fleksibel; memastikan bahwa mahasiswa memiliki akses belajar yang dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan mereka; menyediakan forum bagi mahasiswa untuk menemukan pengetahuan melalui partisipasi dalam komunitas; mahasiswa lebih siap untuk menghadapi dunia pekerjaan dan perkembangan IPTEK. Penghambat keberhasilan MBKM: kebijakan MBKM yang ditetapkan dianggap kurang matang karena belum dapat dipastikan bisa menjangkau kebutuhan pendidikan yang merata khususnya di wilayah perbatasan; perencanaan dalam proses pembelajaran MBKM belum terstruktur dengan baik; sumber daya saat ini dinilai kurang siap dalam melaksanakan MBKM, seperti sistem informasi, sarana dan prasarana, serta pembiayaan pembelajaran. Dalam hal ini kesulitan yang ada di depan mata yang dihadapi oleh perguruan tinggi di wilayah perbatasan adalah infrastruktur yang belum memadai.

Banyak kebijakan/panduan/standar yang harus ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk menerapkan MBKM. Seperti yang kita tahu bahwa masing-masing bentuk kegiatan pembelajaran memiliki mekanisme yang berbeda-beda, maka dari itu disinilah ketajaman pemangku kepentingan internal yang terlibat untuk dapat merumuskan panduan maupun standar operasional prosedur sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan MBKM. Dengan adanya kebijakan yang tepat sasaran serta prosedur yang jelas dapat memudahkan mahasiswa dalam menjalankan dan memilih bentuk kegiatan pembelajaran yang ditawarkan.

## 5. KESIMPULAN

Terdapat dua perguruan tinggi di wilayah perbatasan yang telah menerapkan MBKM, antara lain Institut Shanti Bhuana dan Akademi Manajemen Bumi Sebal yang dapat dikatakan MBKM sudah dilaksanakan. Selain itu, pada kedua perguruan tinggi tersebut dapat dibuktikan bahwa pengelolaan kebijakan, program, kegiatan, telah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan mengenai MBKM, meskipun masih ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Namun, untuk mengatasi beberapa kendala tersebut, dilakukan upaya untuk menindaklanjutinya. Pihak pemangku kepentingan internal terus melakukan *monitoring* dan evaluasi dalam pelaksanaan MBKM. Setiap program maupun kegiatan pembelajaran harapannya mampu menjawab permasalahan pendidikan khususnya di wilayah perbatasan, sehingga mahasiswa di daerah juga mampu bersaing dalam dunia kerja.

## 6. SARAN

Perguruan tinggi yang telah melaksanakan MBKM dapat terus menerus melakukan evaluasi terhadap kebijakan MBKM yang telah ditetapkan. Keberhasilan MBKM merupakan tahapan penting yang harus dipastikan oleh perguruan tinggi untuk meningkatkan sistem penjaminan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A. A. (2022). Implementasi kebijakan merdeka belajar–kampus merdeka (Studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar). *Jurnal Kreatif Online*, 9(4), 32-43.
- Arifin, S., & Muslim, M. (2020). Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 3(1).
- Kemendikbud, R. I. (2020). *Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kepala Biro Hukum Kemendikbud RI.
- Meke, K. D. (2022). Dampak Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 675-685.
- Meke, K. D. (2022). Persepsi Mahasiswa Terhadap Desain Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Survei pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 934-943.
- Purnasari, P. (t.thn.). *Strategi Pembelajaran Pendidikan Dasar di Perbatasan Pada Era Digital*.
- Purnasari, P. D. (2021). Strategi Pembelajaran Pendidikan Dasar di Perbatasan Pada Era Digital. *Jurnal Basicedu*, 5(5), 3089-3100.
- Riyadi, S. H. (2022). Dampak Implementasi MBKM Terhadap Pengembangan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Menuju Research Excellence University. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1018-1029.
- Sadewo, Y. D. (2019). *Pendidikan kewirausahaan berbasis ketahanan nasional dan budaya amare*. Tohar Media.
- Sopiansyah, D. M. (2022). Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 34-41.
- Sulistiyani, E. K. (2021). Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Fakultas Kesehatan dan Non Kesehatan. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 686-698.
- Syafaruddin, S. (2008). *Efektivitas kebijakan pendidikan: konsep, strategi dan aplikasi kebijakan menuju organisasi sekolah efektif*. Rineka Cipta.



### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih diberikan kepada DRTPM KEMENDIKBUDRISTEK atas Pendanaan Penelitian Program Kompetitif Nasional Tahun Anggaran 2022 dan kepada Pusat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana atas segala dukungannya.

Terima kasih juga diberikan kepada Institut Shanti Bhuana dan Akademi Manajemen Bumi Sebalu atas kerja sama baiknya dalam pelaksanaan penelitian ini.